

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

LAPORAN

KEPUASAN SURVEY MASYARAKAT



SEMESTER I TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
LAPORAN
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
SEMESTER I
TAHUN 2022



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga dapat diselesaikannya laporan pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Semester I Tahun 2022. Pedoman pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tujuan dari Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, serta untuk mendapatkan umpan balik (*feedback*) secara berkala atas pencapaian kinerja/kualitas pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha bidang perikanan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya secara berkesinambungan.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna sehingga kritik, saran, dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan demi kesempurnaannya. Kami berharap semoga laporan ini bermanfaat dan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan terhadap penyelenggaraan kegiatan sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tulungagung yang akan datang.

Tulungagung, 18 Juli 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



FAJAR WIDARIYANTO, SP, MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680715 199803 1 008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud Dan Tujuan	1
C. Sasaran	3
D. Ruang Lingkup	3
E. Manfaat	3
BAB II : GAMBARAN UMUM / PROFIL PELAYANAN	
A. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	5
B. Visi, Misi, Motto / Maklumat / Janji Pelayanan	5
C. Pengertian Dan Unsur-Unsur SKM	6
D. Pemantauan, Evaluasi Dan Mekanisme Pelaporan Hasil SKM	7
E. Langkah -Langkah Penyusunan SKM	7
BAB III : HASIL PENGOLAHAN DATA SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT	
A. Teknik Pengolahan Data	11
B. Hasil Pengukuran SKM	12
C. Temuan	14
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan Dan Rekomendasi	15
B. Tindak Lanjut Hasil SKM	16
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Tabel I Kategorisasi Mutu Pelayanan	13
2. Tabel II Nilai Rata-Rata (NRR) Dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 Unsur Pelayanan	13
3. Tabel III Nilai Tertinggi Dan Terendah Tahun 2022	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Pemendagri nomor 24 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu tujuan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih kuat kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik dan sasarannya adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta memberikan hak-hak yang lebih luas kepada masyarakat terhadap pelayanan publik.

Masyarakat biasanya menginginkan perbaikan mutu pelayanan dan memperoleh nilai tambah lainnya dari biaya yang mereka kenakan. Masyarakat akan mengharapkan sesuatu jenis pelayanan yang lebih baik dan apa yang harus ditingkatkan, dan masyarakat sering kali memberikan masukan tentang bagaimana hal tersebut menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Salah satu metode yang umum dipakai untuk mengetahui tingkat kinerja suatu lembaga pelayanan publik adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat, karena sebagai suatu lembaga pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung sangat menyadari bahwa kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur keberhasilan kinerjanya.

Survey kepuasan masyarakat dapat dilakukan sendiri dengan mudah, biaya murah dan dapat digunakan untuk mengumpulkan umpan balik dari keinginan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Hasil dari survey kepuasan masyarakat tersebut dapat diperoleh berbagai informasi sebagai bahan evaluasi kebijakan untuk mengatur prioritas dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung telah melakukan survey kepuasan masyarakat, dengan jumlah responden sebanyak 60 orang pemohon perizinan dari bulan januari sampai maret dan sebanyak 100 orang pemohon perizinan bulan April sampai Juni 2022.

B. Maksud dan tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah :

1. Untuk mengetahui dan mempelajari tingkat kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung, Indeks Kepuasan Masyarakat adalah merupakan gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.
2. Untuk mengetahui perbandingan antara harapan dan kebutuhan dengan pelayanan melalui Data dan Informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
3. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.
4. Untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu unit penyelenggara pelayanan publik.
5. Untuk mengetahui kinerja Aparatur penyelenggara pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung.
6. Adanya data dan informasi untuk bahan pertimbangan kebijakan yang perlu diambil pada waktu yang akan datang dan mengacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.
7. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung.
8. Untuk mengetahui dan mempelajari segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Sasaran

1. Mengetahui tingkat pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Penataan sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan yang ada sehingga pelayanan dapat dilaksanakan lebih efektif, berkualitas, berdayaguna dan berhasil guna.
3. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peranserta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

D. Ruang lingkup

Sesuai dengan Keputusan Bupati nomor 188.45/172/013/2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Bidang Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu pintu kabupaten Tulungagung dan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung, maka pelayanan perizinan yang menjadi ruang lingkup pembuatan SKM, yaitu :

1. Perizinan Online OSS
2. Perizinan Non OSS

E. Manfaat

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat merupakan kegiatan yang sangat penting karena hasilnya dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsure dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat.
4. Diketuainya indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Memudahkan pihak berwenang dalam mempertimbangkan guna penetapan kebijakan pada masa yang akan datang.

6. Munculnya persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.
7. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung.
8. Diketuinya indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksana pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung.

BAB II

GAMBARAN UMUM/ PROFIL PELAYANAN

A. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung nomor 65 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten di bidang Penanaman Modal dan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan PTSP
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan PTSP
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan PTSP
4. Pelaksanaan administrasi Dinas
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Visi, Misi, Motto / Maklumat / Janji Pelayanan

1. Visi

Menciptakan akselerasi pelayanan perizinan didukung dengan peningkatan dan penyempurnaan sistem pelayanan yang akuntabel dan transparan.

2. Misi

Misi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung meliputi :

- a) Meningkatkan efisiensi untuk mencapai tujuan pelayanan
- b) Meningkatkan mutu dan produktifitas pelayanan
- c) Mendorong timbulnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan peluang investasi dan penanaman Modal

3. Motto pelayanan

“Kepuasan Anda harapan Kami”

4. Maklumat Pelayanan

“Dengan ini kami, Pimpinan beserta seluruh karyawan karyawan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan perizinan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

C. Pengertian dan unsur-unsur SKM

Berdasarkan peraturan Menpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 Unsur-unsur dalam kuisioner Survey Kepuasan Masyarakat, meliputi :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu penyelesaian

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/tarif

Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesialis Jenis Pelayanan

Produk spesialis jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi pelaksana

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku pelaksana

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah proses segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (computer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

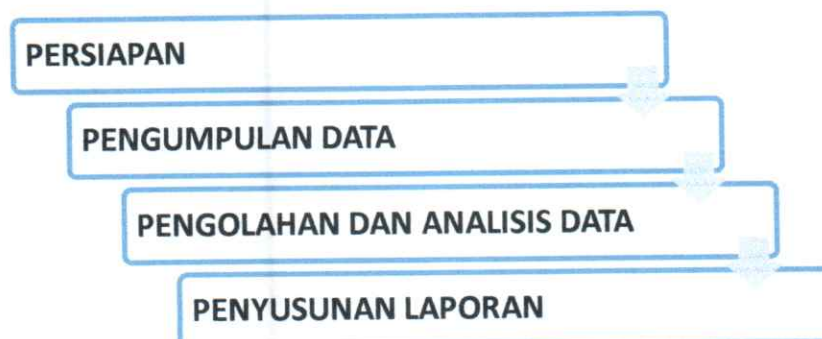
Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksana penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

D. Pemantauan, evaluasi dan mekanisme pelaporan hasil SKM

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung telah secara rutin melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri.
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung telah melaporkan secara rutin pelaksanaan survey kepuasan masyarakat kepada Bupati Tulungagung melalui Kepala Bagian Organisasi Setda Tulungagung, sebagai bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Dalam rangka peningkatan transparansi hasil penyusunan SKM, rencana dan tindak lanjutnya maka Bupati perlu untuk mempublikasikan kepada masyarakat.

E. Langkah-langkah Penyusunan SKM

Langkah-langkah penyusunan SKM dilakukan sebagai berikut :



Gambari 1 : langkah-langkah penyusunan SKM

1. Persiapan

Aktivitas yang dilakukan dalam tahap ini adalah :

- a. Menyusun tim survey kepuasan masyarakat (SKM)
- b. Menyusun jadwal pelaksanaan
- c. Briefing dan role play kepada para interviewer (petugas lapangan) untuk memastikan bahwa mereka paham dengan maksud kuisisioner dan mengerti cara-cara pengumpulan data yang efektif.

a) Penyiapan bahan

1. Kuisisioner

Dalam penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan kuisisioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuisisioner disusun berdasarkan tujuan survey terhadap tingkat kepuasan masyarakat.

2. Bagian dari kuisisioner

Kuisisioner dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu :

Bagian I : identitas responden meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan, bertujuan untuk menganalisa profil responden dalam penilaiannya terhadap unit pelayanan instansi pemerintah.

Bagian II : identitas pencacah, berisi data pencacah (apabila kuisisioner diisi oleh masyarakat, bagian ini tidak diisi).

Bagian III : mutu pelayanan publik adalah pendapat penerima pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai.

3. Bentuk jawaban

Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat puas sampai dengan sangat tidak puas. Untuk kategori sangat tidak puas diberi nilai persepsi 1, tidak puas diberi nilai persepsi 2, cukup puas diberi nilai persepsi 3, puas diberi nilai persepsi 4, dan sangat puas diberi nilai persepsi 5, penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan apabila :

1. Diberi nilai 1 (sangat tidak puas) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dianggap tidak sederhana, alurnya tidak mudah, loket/tahapan untuk memperoleh layanan terlalu banyak, sehingga prosesnya tidak efektif.

2. Diberi nilai 2 (tidak puas) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dianggap masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3. Diberi nilai 3 (cukup puas) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dianggap mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
4. Diberi nilai 4 (puas) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dianggap mudah, sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

b) Kriteria responden

Kriteria untuk responden Indeks Kepuasan Masyarakat adalah para pengguna layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung, pengguna layanan didefinisikan sebagai orang yang sedang mendapat pelayanan.

c) Metode pemilihan responden

Responden dipilih secara simple random sampling dari semua pengguna layanan yang masuk kriteria responden yang setiap hari datang ke kantor DPMPTSP.

2. Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara tatap muka (face to face interviews) dengan menggunakan kuisioner terstruktur. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap ini adalah pembekalan tim pelaksana survey, pengawasan wawancara, pemeriksaan kuisioner yang telah terkumpul, pelaksanaan back-checking kepada 20% responden dan proses validasi kuisioner.

Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui survey kepada masyarakat yang menjadi pelanggan dari instansi pelayanan umum tersebut, dengan jumlah responden adalah 160 (seratus enam puluh) orang. Kegiatan pengumpulan data telah dilaksanakan selama 6 (enam) bulan dimulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2022.

3. Pengolahan dan analisis data

Kuisioner yang telah terisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi Excell. Proses dan analisis data

sesuai dengan petunjuk dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik, sehingga memenuhi standar yang ditetapkan secara nasional. Selain itu survey Indeks Kepuasan Masyarakat ini juga dapat dilakukan penyesuaian dengan kondisi spesifik unit/lembaga pelayanan yang bersangkutan, selanjutnya dapat diolah dengan uji statistik untuk memperoleh informasi yang lebih baik terhadap data yang didapat sehingga hasil survey dapat lebih bermanfaat.

4. Penyusunan laporan

Hasil survey disusun dalam bentuk laporan yang akan menjadi dokumen penting yang menyajikan informasi tentang perkembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung dari olahan dan analisis data yang dapat dijadikan bahan dasar pengusulan peningkatan atau keperluan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

A. Teknik pengolahan data

Kuisisioner yang telah terisi kemudian dikumpulkan dan dioleh secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi Excell, sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,1111$$

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{nilai penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$$

Interpretasi nilai IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus :

IKM unit pelayanan $\times$ 25 atau dengan

$$\text{IKM unit pelayanan} = \frac{\text{Niali IKM} \times 100}{4}$$

Penjelasan istilah SKM :

1. IKM = indeks kepuasan masyarakat
2. U1-U9 = unsur 1 sampai unsur 9
3. NRR = nilai rata-rata per unsur
4. NRR/unsur = nilai rata per unsur dibagi jumlah kuisisioner terisi
5. NRR tertimbang = nilai rata-rata per unsur $\times$ 0,1111
6. *) = jumlah nilai rata-rata tertimbang
7. **) = jumlah nilai rata-rata tertimbang $\times$ 25
8. Angka 25 = bila interpretasi nilai IKM adalah 25-100, maka angka 25 merupakan konvensi nilai dasar
9. Angka 0,1111 = didapat dari bobot per unsur (1) dibagi jumlah unsur (9) berarti $1/9 = 0,1111$

B. Hasil pengukuran SKM

Berdasarkan Peraturan Menpan dan RB Nomor 14 tahun 2017 memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :

1. Persyaratan Pelayanan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu penyelesaian pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Kewajaran Biaya/Tarif pelayanan

Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesialis jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi pelaksana petugas

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku petugas pelayanan

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksana penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah proses segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (computer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor indeks kepuasan masyarakat (IKM) untuk triwulan I : 85,56, dengan angka indeks sebesar 85,56, maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan (A) dengan kategori Sangat Puas, karena berada dalam nilai interval konversi indeks kepuasan masyarakat 81,25 – 100. Sedangkan hasil skor indeks kepuasan masyarakat (IKM) untuk triwulan II : 87,70, dengan angka indeks sebesar 87,70, maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan (A) dengan kategori Sangat Puas, karena berada dalam nilai interval konversi indeks kepuasan masyarakat 81,25 – 100.

Sebagaimana diketahui bahwa kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan indeks asalah sebagai berikut :

Tabel 1
Kategorisasi mutu pelayanan

Nilai interval IKM	Nilai interval konversi IKM	Mutu pelayanan	Kinerja unit pelayanan
1,00 – 1,74	25,00 – 43,74	D	SANGAT TIDAK PUAS
1,75 – 2,49	43,75 – 62,49	C	TIDAK PUAS
2,50 – 3,24	62,50 – 81,24	B	PUAS
3,25 – 4,00	81,25 – 100,00	A	SANGAT PUAS

Tabel 2
Nilai rata-rata (NRR) dan indeks kepuasan masyarakat (IKM) 9 unsur pelayanan Triwulan I

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata	Mutu
U1	Prosedur Pelayanan	3.333	83.333
U2	Persyaratan Pelayanan	3.367	84.167
U3	Perilaku dan kedisiplinan petugas pelayanan	3.417	85.417
U4	Kompetensi petugas	3.783	94.583
U5	Kepastian jadwal waktu pelayanan	3.367	84.167
U6	Keadilan mendapatkan pelayanan	3.350	83.750
U7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.467	86.667
U8	Kewajaran biaya/tarif pelayanan	3.367	84.167
U9	Komitmen pada pelayanan	3.350	83.750
Jumlah		30.800	770.00
nilai rata - rata per unsur		3.4222	85.556

Rata-rata dari nilai suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan yang perlu dipertahankan.

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki nilai (NRR) tertinggi adalah kompetensi Petugas (rata-rata 3,783), sedangkan unsur dengan nilai rata-rata (NRR) terendah adalah unsur Prosedur pelayanan (rata-rata 3,333), nilai unsur IKM 85,56 menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung pada umumnya sudah sangat baik dan sudah sangat puas.

Tabel 3
 Nilai rata-rata (NRR) dan indeks kepuasan masyarakat (IKM) 9 unsur pelayanan Triwulan II

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata	Mutu
U1	Prosedur Pelayanan	3.400	85.000
U2	Persyaratan Pelayanan	3.480	87.000
U3	Perilaku dan kedisiplinan petugas pelayanan	3.680	92.000
U4	Kompetensi petugas	3.490	87.250
U5	Kepastian jadwal waktu pelayanan	3.640	91.000
U6	Keadilan mendapatkan pelayanan	3.580	89.500
U7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.560	89.000
U8	Kewajaran biaya/tarif pelayanan	3.360	84.000
U9	Komitmen pada pelayanan	3.380	84.500
Jumlah		31.570	789.25
nilai rata - rata per unsur		3.5078	87.702

Rata-rata dari nilai suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan yang perlu dipertahankan.

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki nilai (NRR) tertinggi adalah Perilaku dan kedisiplinan petugas (rata-rata 3,680), sedangkan unsur dengan nilai rata-rata (NRR) terendah adalah unsur kewajaran biaya/tariff pelayanan (rata-rata 3,360), nilai unsur IKM 87,70 menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung pada umumnya sudah sangat baik dan sudah sangat puas.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, maka yang perlu diprioritaskan adalah pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, namun hal tersebut tidak mempengaruhi mutu pelayanan, karena semakin rendah unsur penanganan pengaduan saran dan masukan berarti mutu pelayanan semakin baik, tetapi tetap harus ditingkatkan. Sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Dari 9 (sembilan) unsur yang ditetapkan seluruhnya dapat dikategorikan sudah mencukupi unsur nilai indeks kepuasan masyarakat karena nilai interval IKM di interval 81,25 – 100 yang berarti mutu pelayanan A (Sangat Puas).

Pelayanan di atas harus ditingkatkan khususnya unsur pelayanan yang nilainya rendah.

C. Temuan

Walaupun secara umum masyarakat telah merasa sangat puas terhadap pelayanan yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung akan tetapi ada beberapa keluhan yang disampaikan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain :

1. Banyak pemohon yang menuliskan saran supaya jam pelayanan ditambah.
2. Kekonsistenan petugas dalam pelayanan tetap dijaga.

Pelaksanaan survey secara umum dapat berjalan lancar sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan survey, antara lain :

1. Pemohon Izin banyak yang tidak bersedia disurvey dengan berbagai alasan karena waktu yang terburu-buru.
2. Permohonan Izin seringkali mau memberikan pendapat secara lisan akan tetapi enggan untuk memberikan pendapat secara tertulis.

BAB IV

PENUTUP

Survey kepuasan masyarakat ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun dan dilaksanakan secara mandiri oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung. Walaupun petugas telah berusaha semaksimal mungkin agar survey ini dapat memenuhi kaidah-kaidah penelitian yang berlaku secara umum sehingga informasi yang ada benar-benar dapat mewakili dan menggambarkan persepsi masyarakat, khususnya pemohon Izin terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung, akan tetapi kami menyadari bahwa pelaksanaan survey masih banyak kekurangan dan kendala yang dihadapi, untuk itu kami mohon saran dan masukan agar di masa yang akan datang pelaksanaan survey dapat berjalan secara lebih baik.

A. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung diperoleh indeks kepuasan masyarakat sebesar 85,56 pada Triwulan I dan angka indeks sebesar 87,70 pada Triwulan II tahun 2022 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan (A) dengan kategori Sangat Puas, karena berada dalam nilai interval konversi indeks kepuasan masyarakat 81,25 – 100.

2. Dari nilai pada poin 1 menggambarkan bahwa dalam bidang pelayanan prima, masyarakat menginginkan pelayanannya memuaskan yaitu praktis, efisien dan mudah.

3. Rekomendasi

- a) Perlu adanya tindak lanjut terhadap hasil survey maupun keluhan yang disampaikan masyarakat untuk perbaikan mutu pelayanan dimasa yang akan datang sehingga tujuan survey kepuasan masyarakat dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
- b) Survey agar dilakukan secara berkala, sehingga dapat membandingkan perkembangan kinerja secara periodik.

B. Tindak Lanjut Hasil SKM

Sesuai dengan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung serta saran dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, maka kami akan segera menindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kepuasan terhadap masyarakat.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



FAJAR WIDARIYANTO, SP, MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680715 199803 1 008

TABEL : REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT
SEMESTER I TAHUN 2022

NO	SARAN & REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Penambahan jam pelayanan agar ditambah	
2	Kekonsistenan petugas dalam pelayanan di jaga baik	
3	Pelayanan sudah baik agar lebih ditingkatkan lagi menjadi semakin baik	

Tulungagung, 18 Juli 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



FAJAR WIDARIYANTO, SP, MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680715 199803 1 008

TABEL : NILAI IKM TERTINGGI DAN TERENDAH
TAHUN 2022

NO	TAHUN	NILAI IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN		KETERANGAN
			TERTINGGI	TERENDAH	
1	2022 triwulan I (jan-maret)	85,56	Kompetensi Petugas (94,58)	Prosedur pelayanan (83,33)	9 unsur pelayanan
2	2022 triwulan II (april-juni)	87,70	Perilaku Pelaksana (92,00)	Kewajaran biaya/tarif pelayanan (84,00)	9 unsur pelayanan
3	2022 triwulan III (Juli-September)				
4	2022 triwulan IV (Oktober-Desember)				

Tulungagung, 18 Juli 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



FAJAR WIDIARIYANTO, SP, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680715 199803 1 008

